

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD)**

**(Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode
2018 – 2021)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Reizka Putri Shefina

No. Mahasiswa 20312389

**FAKULTAS BISNIS DAN
EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

**(Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 –
2021)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Reizka Putri Shefina

No. Mahasiswa: 20312389

**FAKULTAS BISNIS DAN
EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Penulis,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shefina'.

(Reizka Putri Shefina)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)**

**(Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018
– 2021)**

SKRIPSI

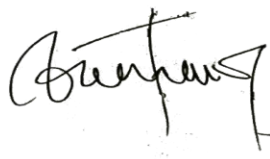
Diajukan Oleh:

Nama: Reizka Putri Shefina

No. Mahasiswa: 20312389

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 13 Juni 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sigit Handoyo', is written over a faint, circular official stamp.

(Sigit Handoyo, S.E., M.Bus., CFrA.)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : REIZKA PUTRI SHEFINA
NIM : 20312389
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Jawa Tengah
Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.
Anggota Tim : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Yogyakarta, 04 Juli 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Jawa Tengah

Disusun oleh : REIZKA PUTRI SHEFINA

Nomor Mahasiswa : 20312389

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 04 Juli 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

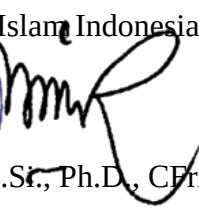


Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji Syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang selalu tercurah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis masih berkesempatan menjalani kehidupan sehari – hari.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Terima kasih kepada Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Terima Kasih kepada Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus., CFra. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, pembelajaran, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Terima kasih kepada Ibu Ratmi Chosiyati dan Bapak Sukamto selaku orang tua penulis yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dan doa yang terus dipanjatkan untuk penulis.
5. Terima kasih kepada Anis Nur Ariffin selaku kakak kandung penulis yang telah memberikan bantuan ilmu pengetahuan, semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
6. Terima kasih kepada Ikhsan Fajariansyah Moro yang telah menemani dan memberikan semangat serta motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Ninditya Wahyu Febriani, Qiela Fadia Hayya, Salwa Habibah, Thesa Kurnia Dewi dan Muhammad Noer Hidayah Rifai selaku kerabat satu bimbingan dan kerabat dekat penulis yang telah menemani dan memberikan dukungan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada Oif Alifia Putentra, Annisa Septia, Zalfa Firda yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.

Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan balasan atas apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima sebagai tambahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk tahun berikutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Juni 2024



(Reizka Putri Shefina)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel	7
2.1.1 Teori Keagenan	7
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.1.4 Belanja Modal	11
2.1.5 Dana Perimbangan.....	12
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Hipotesis Penelitian.....	23
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23

2.3.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	
	Daerah.....	24
2.3.3	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	
	Daerah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	27
3.3.1	Variabel Independen.....	27
3.3.2	Variabel Dependen	28
3.4	Metode Analisis Data	29
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif	29
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	29
3.4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	31
3.4.4	Uji Hipotesis.....	32
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Deskripsi Data Penelitian	35
4.2	Uji Asumsi Klasik	38
4.2.1	Uji Normalitas Data.....	38
4.2.2	Uji Multikolinearitas.....	39
4.2.3	Uji Heterokedastisitas	40
4.2.4	Uji Autokorelasi	41
4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	42
4.4	Uji Hipotesis.....	43

4.4.1 Uji Statistik t (Parsial).....	43
4.4.2 Uji Statistik F (Simultan)	45
4.5 Pembahasan	46
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	46
4.5.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	47
4.5.3 Pengaruh Dana Perimbang Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
5.3. Implikasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif	35
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Data	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	41
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	41
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik (Parsial)	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik F (Simultan)	46

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut seberapa berpengaruhnya pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan berupa 35 laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data ini dikumpulkan dari data tahunan pemerintah daerah periode 2018–2021 yang telah diaudit oleh BPK. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Tidak terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan. Terdapat pengaruh negatif antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan, Teori Keagenan, Rasio Kemandirian

ABSTRACT

This research aims to find out more about how influential regional original income, capital expenditure and balancing funds are on regional government financial performance. The sample used was 35 district/city government financial reports in Central Java Province. This data was collected from annual regional government data for the 2018–2021 period which has been audited by the BPK. The analytical method used in this research uses multiple linear regression with the SPSS program. The results of this research show that there is a positive influence between local revenue on financial performance. There is no influence between capital expenditure on financial performance. There is a negative influence between balancing funds on financial performance.

Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Balancing Fund, Financial Performance, Agency Theory, Independence Ratio.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan badan atau entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan di tingkat regional, seperti provinsi, kabupaten, kota, di bawah pemerintah pusat atau nasional. Pemerintah daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan (Marsono, 2005). Pemerintah daerah ini memiliki peran penting terhadap kesejahteraan dan pembangunan di tingkat regional. Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya mengenai kewenangan kekuasaan daerah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, pengaturan, pengelolaan kebijakan, dan pengembangan wilayah regional. Pemerintah daerah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah undang – undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia. Undang – undang ini memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta tata cara pengelolaan urusan pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan desentralisasi, maka pemerintah daerah diharapkan

dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengelola aset daerah secara efektif, melakukan pengembangan sumber daya dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pariwisata. Semakin optimal kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat menunjukan independensi keuangan daerah dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan potensi peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal yang sifatnya akan menambah aset tetap atau dapat menambah inventaris yang mana akan memberikan manfaat melewati dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk juga di dalamnya yaitu pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan dan menambah masa manfaat, serta untuk meningkatkan kapasitas kualitas dari aset itu. Belanja modal memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belanja modal melibatkan investasi jangka Panjang dalam infrastruktur, proyek – proyek pembangunan, dan aset publik lainnya. Dengan adanya penanaman modal dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan kondisi umum daerah setempat.

Dalam Undang – undang nomor 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah karena digunakan untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan persentase menurun ketika masyarakat menjadi ketergantungan terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya.

Penelitian mengenai analisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang dilakukan oleh (Antari & Sedana, 2018) yang menunjukkan hasil penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh (Ardelia, Wulandari, Ernitawati, & Dumadi, 2022) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selain itu, hasil dari penelitian terdahulu (Bilqis & Priyono, 2023) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan sampel penelitian dari Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018 hingga tahun 2021.

Peneliti melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut seberapa berpengaruhnya pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018); Sari & Mustanda (2019); (Fauziyah & Ekaningtias, 2022) dengan menggabungkan beberapa variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan sedangkan variabel independen meliputi pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan. Peneliti menggunakan rasio kemandirian sebagai pengukuran kinerja keuangan daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 – 2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pendalaman teori dan pengetahuan bidang akuntansi, terutama di bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan LKPD dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kajian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah selama 5 tahun apakah berjalan untuk semestinya atau sebaliknya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas berbagai aspek penelitian, seperti latar belakang yang mendasari penelitian, penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan pengertian variabel, telaah penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan mendeskripsikan mengenai metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri atas sub-bab populasi dan sampel, serta model analisis data.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, hasil pengujian, serta pembahasan dan hasil terkait teori yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisa pada bab sebelumnya, implikasi dan saran untuk penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Teori Keagenan

Siagian (2011) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada hubungan atau perjanjian antara agen dan pemilik. Hubungan keagenan terdiri kontrak antara satu orang atau lebih individu (prinsipal) dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama prinsipal, yang juga melibatkan pemberian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Halim & Abdullah (2010) menyatakan bahwa teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian dua atau lebih pihak, pihak pertama disebut sebagai *principal* dan pihak kedua disebut sebagai lawan. Pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perintah dalam pengawasan, penilaian dan masukan terhadap pekerjaan agen disebut sebagai *principal*. Sedangkan pihak yang menerima tanggung jawab *principal* dan menjalankannya sesuai dengan yang diberikan kepada mereka adalah agen/lawan. Pada sektor publik, *principal* diwakilkan oleh rakyat yang dalam hal ini dipresentasikan dengan legislatif (DPRD) sedangkan agent dipresentasikan dengan eksekutif (pemerintah).

Dalam hubungan keagenan antara legislatif sebagai agen dan publik sebagai prinsipal. Maulana (2015) menyatakan bahwa pada saat penyusunan APBD,

sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu dibuat sebuah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mengenai arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Ketika pejabat kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran, maka diharapkan untuk mewakili kepentingan *principal*. Sebagai agen, tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan daerah yang komprehensif dapat digunakan sebagai alat untuk peningkatan akuntabilitas publik (Superdi, 2017). Karakteristik laporan keuangan pemerintah harus relevan, transparansi, dapat dipercaya, akuntabilitas, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat terdiri dari beberapa komponen utama, seperti neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, laporan keuangan pemerintah daerah adalah kumpulan dokumen yang menunjukkan hasil kinerja dan aktivitas keuangan pemerintah daerah selama periode waktu tertentu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 (revisi) memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan laporan dengan laporan keuangan:

“Dalam PSAK ini mengatur tentang standarisasi tentang pembuatan laporan keuangan agar tercapai tujuan umum dalam pembuatan laporan keuangan (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’. Tujuan secara umum agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

“Unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing Kementerian negara atau Lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.”

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diminta untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan pemerintahan daerah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diterima oleh daerah dari pungutan yang diatur undang-undang dan sumber kekayaan potensial dapat disebut sebagai pendapatan asli daerah (Halim, 2007). Pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sektor usaha,

yang kemudian akan menggunakan pendapatan sektor usaha untuk membiayai kebutuhan pelayanan dan pembangunan daerah. Semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah disebut PAD.

Terdapat beberapa sumber penerimaan sebagai berikut: Pertama, pajak daerah yang dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, retribusi daerah menurut Saragih (2003:65) retribusi daerah merupakan “pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Mangku Soebroto (1985:182) retribusi adalah pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Ketiga, hasil pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah terpisah, yang

ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan seharusnya dapat diputar dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk meningkatkan kepercayaan publik dan

produktivitas masyarakat. Menurut Mursyidi (2009) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari tahun anggaran, menambah aset pemerintah, dan meningkatkan belanja operasi umum. Investasi dalam pelayanan publik didanai melalui belanja modal pelayanan publik.

Menurut (Astuti & Mimba, 2016) pembagian dana belanja modal akan sangat membantu daerah untuk mendapatkan sumber keuangan dari potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, menurut Andirfa et al., (2016) infrastruktur yang tersedia dengan baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan tinjauan di berbagai sektor.

2.1.5 Dana Perimbangan

Menurut Andaresta & Aswar (2021) dana perimbangan merujuk pada pembiayaan daerah yang meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dana daerah yang dialokasikan oleh APBN dan sumber lain yang terkait dengan pemerintah pusat kemudian digunakan untuk membiayai upaya desentralisasi dengan menyeimbangkan anggaran antar berbagai pemerintah daerah. Dana diberikan ke badan pemerintah lokal di masing – masing daerah oleh pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk ekonomi dan pekerjaan umum di masing – masing wilayah. Jumlah dana yang dibagi berdasarkan potensi pendapatan masing – masing daerah.

Sebagian besar dana APBD berasal dari sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan membuat sebuah peraturan daerah, yang didasarkan pada kualitas pengelolaan keuangan (Nugraha & Trisnawati, 2019). Dana perimbangan dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Aspek kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi dana perimbangan sebagai berikut. Pertama, dana perimbangan dapat memberikan stabilitas keuangan kepada pemerintah daerah. Kedua, dana perimbangan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga, dana perimbangan dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran gaji pegawai.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Metode untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangan. Alur keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh analisis kinerja keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menentukan alur keuangan pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014). Sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah karena berdampak besar pada sektor publik. Selain itu, penilaian kemampuan keuangan dan akuntabilitas daerah untuk menerapkan otonomi didasarkan pada kinerja keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio

kemandirian, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Halim, 2008: 230). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan penelitian. Antari & Sedana (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah LKPD di Provinsi Bali periode tahun 2011-2015. Variabel independen yang digunakan peneliti yaitu pendapatan asli daerah, dan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tahun berikutnya Sari & Mustanda (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung periode 2013-2017. Variabel independen yang digunakan terdapat ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya variabel ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh negatif

terhadap kinerja keuangan, sedangkan pendapatan asli daerah serta belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Fauziyah & Ekaningtias (2022) melakukan penelitian terkait pengaruh pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. sampel pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015 – 2019. Hasil dari penelitian ini hanya variabel dana perimbangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun yang sama Ramadhan et al., (2022) melakukan penelitian terkait pengaruh pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu LRA Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan daerah.

Ardelia et al., (2022) juga melakukan penelitian di tahun yang sama terkait pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks.

Karesidenan Pekalongan periode 2016 – 2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Bilqis & Priyono, 2023) terkait pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015 – 2020. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pradana & Handayani (2023) juga melakukan penelitian di tahun yang sama dengan membahas pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel pada penelitian ini yaitu LRA pendapatan dan belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2021. Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Antari & Sedana, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variable belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.	(Sari & Mustanda, 2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli i Daerah dan Belanja Moda l Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya variabe l ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan pendapatan asli daerah serta belanja modal berpengaruh positif terhada p kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.
----	-------------------------	---	---	---

3.	(Fauziah & Ekaningtias, 2022)	Pengaruh Pertumbuhan Belanja,	Variabel Dependen:	Hasil dari penelitian ini hanya variabel
				1

		Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, Dana Perimbangan	dana perimbangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---

4.	(Ramadhan et al., 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah , dan Kemandirian	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Variabel Independen:	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel pendapatan asli daerah,
----	-------------------------------	---	---	--

		Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah	pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan daerah.
5.	(Ardelia et al., 2022b)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota se-eks Karesidenan	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

				daerah, belanja modal tidak berdampak
--	--	--	--	---

		Pekalongan periode 2016-2020)		signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	(Bilqis & Priyono, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap

		2015-2020		kinerja keuangan, sedangkan belanja
--	--	-----------	--	---

				modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
7.	(Pradana & Handayani, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah adalah PAD. Selain itu, PAD terdiri dari uang yang diterima setiap daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan. Untuk memastikan proses desentralisasi berjalan dengan baik, pendapatan asli daerah juga dapat digunakan untuk membiayai semua program atau inisiatif pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi masing – masing daerah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ini menunjukkan bagaimana dan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai seluruh operasi pemerintah yang ada, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Akibatnya, kinerja keuangan akan meningkat jika pendapatan asli daerah meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Antari & Sedana (2018) yang menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah, yang berarti bahwa daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan pusat. Selain itu, Sari & Mustanda (2019) menemukan bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun menunjukkan sumber keuangan daerah yang kuat. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Antari & Sedana (2018); Sari & Mustanda (2019); Ramadhan et al., (2022); Ardelia et al., (2022); Bilqis & Priyono (2023) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan, serta meningkatkan kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah tetap harus mengawasi dan menyesuaikan belanja daerah agar tidak melebihi pendapatan. Keuangan daerah akan menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan pengeluaran yang diperoleh dari belanja modal untuk pembangunan, yang nilai manfaatnya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Jika semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah dengan memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat (Andirfa et al., 2016).

Berdasarkan penelitian Sari & Mustanda (2019) dan Andirfa et al., (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sutrisno & Sugiyanto (2020) bahwa dana perimbangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah saat menerapkan pemerintahan terdesentralisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa desentralisasi memerlukan keseimbangan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan juga memungkinkan perbedaan sumber daya keuangan vertikal dan horizontal antara daerah dan pusat. Dalam kaitannya dengan teori keagenan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas wewenang tersebut dengan menjalankan pengelolaan keuangan yang sehat dan meningkatkan penyediaan layanan publik yang merata dan optimal. Pemerintah daerah berfungsi sebagai agen, dan pemerintah pusat berfungsi sebagai prinsipal dalam situasi ini. Penelitian Andirfa et al., (2016); Fauziyah & Ekaningtias (2022); Ardelia et al., (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE

PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Populasi penelitian ini adalah sejumlah 35 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan data kuantitatif yang digunakan berasal dari instansi terkait. Semua anggota populasi disurvei menggunakan metode *non-probability*, yang memungkinkan setiap anggota populasi untuk disurvei dengan kemungkinan yang sama. Laporan tersebut mencakup laporan pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan kinerja keuangan pemerintah. Data ini dikumpulkan dari data tahunan pemerintah daerah periode 2018 – 2021 yang telah diaudit oleh BPK.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kuantitatif ini menggunakan data dokumenter dari catatan dokumen yang sudah ada. Sumber data sekunder terdiri dari dokumen dan publikasi yang sudah berbentuk jadi dan siap digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2021 yang telah diaudit oleh BPK.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen dan dependen. Pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dipilih sebagai variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah daerah dipilih sebagai variabel dependen.

3.3.1 Variabel Independen

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari potensi penerimaan sumber ekonomi daerah dari pungutan yang diatur oleh perundang-undangan, serta dari potensi kekayaan daerah sendiri. Sumber – sumber pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dari daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD

3.3.1.2 Belanja Modal (BM)

Penelitian ini menggunakan data realisasi belanja modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2018 – 2021. Total belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta

belanja modal aset tetap lainnya.

BM = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

3.3.1.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Pembangunan daerah agar desentralisasi dapat tercapai. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan terbagi menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan = DBH + DAU + DAK

3.3.2 Variabel Dependen

3.3.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian dalam penelitian ini. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa bergantungnya pemerintah daerah pada pemerintah pusat atau pihak eksternal dalam membiayai kegiatan mereka dan mengatur kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan yang ada atau berasal dari pendapatan transfer dari pihak eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka akan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Sehingga dapat dikatakan Tingkat rasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan Tingkat

ketergantungan daerah terhadap biaya bantuan pihak eksternal.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

3.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan data gabungan selama 4 tahun terakhir (2018 – 2021) yang terdapat dalam LKPD Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif, analisis regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel – variabel dalam penelitian. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data bersamaan dengan penghitungan yang akan membantu menjelaskan keadaan dan karakteristik data tersebut. Uji statistik deskriptif terdiri atas pengukuran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (*mean*), dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menentukan apakah terdapat masalah asumsi klasik. Uji ini terdiri dari beberapa asumsi, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah penyebaran data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan. Syarat untuk memenuhi uji normalitas adalah nilai (K-S) memiliki angka probabilitas di atas $\alpha=5\%$.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi korelasi antar variabel independen. Model regresi dianggap baik apabila tidak adanya hubungan atau korelasi antara variabel independen. Nilai *tolerance* (TOL), yang merupakan besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dapat digunakan untuk menentukan apakah ada masalah multikolinieritas atau tidak. Apabila nilai *tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 , maka hal itu menunjukkan adanya multikolinieritas atau korelasi.

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Dalam model regresi, uji heterokedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam ketidaksamaan varian residual antara peneliti atau pengamat tertentu pada suatu periode. Jika varian dari peneliti atau pengamat satu dengan lainnya memiliki perbedaan dapat disebut heteroskedastisitas, dan dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hasil pengujian lebih besar dari $\alpha=5\%$ maka terdapat heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji Autokorelasi adalah untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linear. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual, atau kesalahan pengganggu, tidak dapat dilepaskan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Pendekatan asumsi autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Lagrange Multiplier (LM Test)*. Kriteria pengujian pada metode ini yaitu apabila *Chi square* hitung < *Chi square* tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Nilai *Chi Square* didapat dengan cara mengalikan hasil *R Square (Model Summary)* dengan jumlah data (N), sedangkan nilai *Chi Square* tabel dapat dilihat dari Df = N-1 dan $\alpha = 0,05$.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah studi tentang bagaimana perubahan terjadi pada beberapa variabel dependen karena pengaruh variabel independen. Ini dapat dicapai dengan menggunakan model regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Analisis pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan metode regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan

α	: Nilai konstanta
Q1, Q2, Q3	: Nilai coefficients dari variabel bebas
X1	: Pendapatan Asli Daerah
X2	: Belanja Modal
X3	: Dana Perimbangan
e	: Kesalahan pengganggu

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Statistik t (Parsial)

Analisis penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ini disimpulkan setelah penelitian menggunakan tes (Ghozali, 2018). Ini karena hasil uji signifikansi menunjukkan nilai di atas 0,05. Akibatnya, hipotesis ditolak dan ditemukan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Faktor independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial, menurut koefisien regresi yang signifikan antara keduanya. Hipotesis dapat diterima jika koefisien korelasi signifikansinya dibawah 0,05.

3.4.4.2 Uji Statistik F (Simultan)

Pada model dapat dilakukan uji F untuk memastikan kelayakannya. Tes ini mengevaluasi validitas model dengan menghitung persentase perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh setiap variabel independen. Pengujian simultan memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi semua variabel dependen secara bersamaan. Percobaan ini

dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Menurut Ghozali (2018) bahwa nilai F digunakan untuk menentukan apakah suatu model memenuhi kriteria yang sesuai. Dalam pengujian simultan ini terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu dengan menggunakan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima sedangkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisa hasil penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021)”. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berasal dari LKPD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2021. Hasil dari statistik deskriptif dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	140	25,9119	28,5006	26,6449	0,4070
BM	140	25,3491	27,8368	26,4148	0,4641
DP	140	26,9810	28,4368	27,8699	0,3289
Kinerja Keuangan	140	2,5275	4,6330	3,1497	0,3791

Valid	140	
N		
(listwise)		

Sumber: *Output Data SPSS, 2024*

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat serta pinjaman. Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan skor minimum dan maksimum dari variabel kinerja keuangan yakni 2,5275 dan 4,6330. Nilai minimum kinerja keuangan dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yaitu 2,5275 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2021 yaitu sebesar 4,6330. Nilai rata – rata kinerja keuangan pada periode tahun 2018-2021 sebesar 3,1497.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel independen pada penelitian ini. Pendapatan asli daerah didapatkan dari LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel dapat dilihat skor minimum dan maksimum dari variabel PAD yakni 25,9119 dan 28,5006. Nilai minimum pendapatan asli daerah dimiliki oleh Kota Pekalongan tahun 2018 yaitu 25,9119 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang tahun

2021 yaitu sebesar 28,5006. Nilai rata-rata PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2018-2021 sebesar 26,6449.

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan variabel independen pada penelitian ini. Belanja modal bagian dari belanja daerah yang mempunyai anggaran tahunan dan meningkatkan aset dan kekayaan suatu wilayah. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan skor minimum dan maksimum dari variabel belanja modal yakni 25,3491 dan 27,8368. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Temanggung tahun 2020 yaitu 25,3491 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2018 yaitu sebesar 27,8368. Nilai rata – rata belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021 sebesar 26,4148.

4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan variabel independen pada penelitian ini. Dana Perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan skor minimum dan maksimum dari variabel dana perimbangan yakni 26,9810 dan 28,4368. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Salatiga tahun 2020 yaitu 26,9810 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Brebes tahun 2021 yaitu sebesar 28,4368. Nilai rata – rata dana perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021 sebesar 3,1497.

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data setelah terdistribusi normal atau tidak. Metode pengujian pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov*. Data yang terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05) dan apabila nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05) maka nilai residual terdistribusi tidak normal. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan *asyp.sig* sebesar 0,139. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal dan memenuhi syarat sebagai uji normalitas karena *asyp.sig* $0,139 > \alpha$ (0,05). Hasil penelitian uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Data

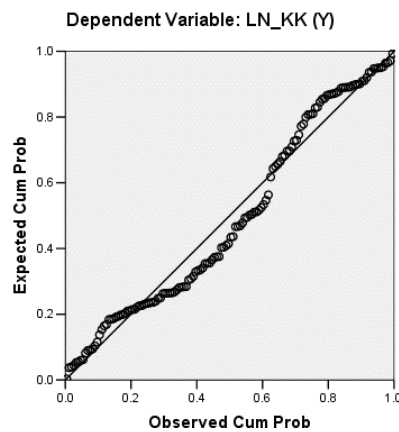
	Unstandardized Residual	Keterangan
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,139	Terdistribusi Normal

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Dari hasil pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah terdistribusi normal. Selain *Kolmogrov Smirnov*, pendekatan grafik Normal *P-P Plot of Regression Standard* juga diterapkan oleh penguji pada penelitian ini. Pada Gambar 4.1 terlihat titik-titik mengikuti pola diagonal dan tersebar di sekeliling garis diagonal tersebut. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini data terdistribusi normal. Hasil pendekatan grafik Normal *P-P Plot of Regression Standard* dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output Data SPSS, 2024

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen pada model regresi. Dasar pengambilan Keputusan dalam pengujian ini yaitu jika *Variance Inflation factor* (*VIF*) dengan kriteria nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
PAD	0,691	1,448
Belanja Modal	0,569	1,757
Dana Perimbangan	0,608	1,644

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Hasil pengujian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki angka *VIF* lebih kecil atau < 10 . Selain itu, tabel 4.3 juga menunjukkan angka *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,10. Berdasarkan angka *VIF* dan *tolerance* yang didapat dari pengujian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik berupa adanya ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Kriteria nilai pada pengujian ini yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
PAD	0,365
Belanja Modal	0,187
Dana Perimbangan	0,067

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4.4, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan data-data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heterokedastisitas.

4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada pengujian ini peneliti menggunakan metode *Lagrange Multiplier (LM Test)*. Kriteria pengujian dari metode ini yaitu apabila *Chisquare* hitung < *Chi square* tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary</i>	
model	<i>R Square</i>
1	0,948

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.5, Nilai *Chi square* dapat dihitung dengan cara mengalikan hasil *R Square* dengan jumlah data (N=140). Pada tabel tersebut menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,948, sehingga didapat nilai *Chi Square* hitung adalah sebesar 132,72. Pada tabel *Chi Square*, diperoleh nilai *Chi Square* tabel sebesar 167,514 (df = N-1, $\alpha=0,05$). Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dikarenakan *Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel.

4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat pengaruh dari suatu variabel independen atas variabel dependen. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Sig.
(constant)	5,365	0,000
PAD (X1)	0,947	0,000
Belanja Modal (X2)	-0,001	0,959
Dana Perimbangan (X3)	-0,984	0,000

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Hasil perhitungan dari analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 5,365 + 0,947X_1 - 0,001X_2 - 0,984X_3$$

1. Konstanta dengan angka 5,365, menjelaskan apabila kondisi variabel PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y atau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 5,365.
2. Koefisien X_1 dengan angka 0,947, artinya Pendapatan Asli Daerah atau X_1 memiliki arah positif keterkaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika X_1 meningkat sebesar 1, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebanyak 0,947 dengan asumsi variabel X_2 dan X_3 konstan.
3. Koefisien X_2 dengan angka -0,001, artinya Belanja Modal atau X_2 mempunyai arah negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan ini ditentukan dengan asumsi bahwa X_1 dan X_3 tetap konstan. Untuk setiap 1 yang dibelanjakan akan menurunkan kinerja sebesar 0,001 dari kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Koefisien X_3 dengan angka -0,984, artinya Dana Perimbangan atau X_3 mempunyai arah negatif pada kinerja keuangan. Hubungan ini ditentukan dengan asumsi bahwa X_1 dan X_2 tetap konstan. Untuk setiap kenaikan satu akan menurunkan kinerja sebesar 0,984 dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Statistik t (Parsial)

Analisis pengujian individual atau parsial digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan Keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi. Apabila nilai signifikansi variabel independen lebih rendah dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05, maka hipotesis yang diajukan dapat dinyatakan signifikan. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih tinggi dari pada tingkat signifikansi, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan tidak signifikan. Hasil uji statistik t (parsial) dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik (Parsial)

Model	B	T	Sig.
Constant	5,365	8,069	0,000
PAD (X1)	0,947	43,189	0,000
Belanja Modal (X2)	-0,001	-0,052	0,959
Dana Perimbangan (X3)	-0,984	-34,028	0,000

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Dari data di tabel 4.7, peneliti dapat memberikan analisis hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil uji t, diketahui bahwa nilai t hitung

variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 43,189 dengan nilai signifikansi 0,00. Hasil yang didapat adalah nilai signifikansi lebih rendah dari pada tingkat signifikansi yaitu $0,00 < 0,05$ dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama **diterima**.

Pada variabel belanja modal memiliki nilai t hitung sebesar -0,052 dan nilai signifikansi 0,959. Hasil yang didapat adalah nilai signifikansi lebih besar dari pada tingkat signifikansi yaitu $0,959 > 0,05$ dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua **ditolak**.

Pada variabel dana perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar -34,028 dan nilai signifikansi 0,00. Hasil yang didapat adalah nilai signifikansi lebih rendah dari pada tingkat signifikansi yaitu $0,00 < 0,05$ dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana perimbangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga, **diterima**.

4.3.2 Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian simultan memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi semua variabel dependen secara bersamaan. Percobaan ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik f dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Model	F	Sig.
Regression	825,494	0,000

Sumber: Output Data SPSS, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.8 hasil uji f, menunjukkan bahwa nilai F hitung untuk penelitian ini sebesar 825,494 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa secara simultan, kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai koefisien B adalah 0,947 yang artinya pendapatan asli daerah atau X1 memiliki arah positif terhadap variabel Y dan apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,947 dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$. Dari hasil tersebut nilai signifikan lebih rendah daripada tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa **terdapat pengaruh positif** antara pendapatan asli daerah (H_1) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gina & Panji (2018); Sari & Mustanda

(2019); Pradana & Handayani (2023) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, pajak dan retribusi daerah merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah, selaku agen, bertanggung jawab untuk mengelola dana dari masyarakat tersebut. Masyarakat, selaku prinsipal, memiliki otoritas untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya keuangan pemerintah daerah yang berasal dari masyarakat tersebut dapat dioptimalkan sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai koefisien B adalah -0,001 yang artinya belanja modal atau X2 mempunyai arah negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk setiap 1 yang dibelanjakan akan menurunkan kinerja sebesar 0,001 dari kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan asumsi variabel X1 dan X3 adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai sig. 0,959 > 0,05. Dari hasil tersebut nilai signifikansi lebih besar dari pada tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa **tidak berpengaruh** antara belanja modal (H_2) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrani

& Diah (2022), Abdullah et al., (2022) dan Bilqis & Priyono (2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal mempunyai arah negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah yaitu saat pandemi Covid-19. Hal itu dikarenakan pada saat tahun 2020 dan 2021 Indonesia sedang mengalami wabah Covid-19. Selama 2 tahun itu, belanja modal tidak sesuai dengan RAPBN yang sudah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa dana dialihkan untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat, dan dana yang digunakan untuk anggaran belanja modal seharusnya tidak lebih dari yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu, dapat menyebabkan belanja modal memiliki arah negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh Dana Perimbang Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai koefisien B adalah -0,984 yang artinya dana perimbangan atau X3 memiliki arah negatif pada kinerja keuangan. Untuk setiap kenaikan 1 akan menurunkan kinerja sebesar 0,984 dari kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan asumsi variabel X1 dan X2 adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi menunjukkan nilai sig. $0,00 < 0,05$. Dari hasil

tersebut dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih rendah dari pada tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan dana perimbangan (*H3*) **berpengaruh negatif** terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika et al., (2022) yang menyatakan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika banyak dana yang diberikan oleh pusat, pemerintah daerah menunjukkan kondisi kinerja keuangan yang buruk dan kehilangan kemandirian karena mereka tidak dapat menggunakan sumber daya ini secara mandiri. Meskipun dana perimbangan dapat bermanfaat untuk menyediakan pelayanan publik dengan baik, akan tetapi hal ini seringkali tidak terjadi. Jumlah dana yang diterima oleh setiap daerah rendah dan tidak meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Selain itu, pemerintah daerah sebagai agen sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun karena dana transfer dari pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dan hipotesis yang telah disusun dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, demikian sebaliknya.
2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan maupun penurunan belanja modal tidak akan mempengaruhi perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil pengujian dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa dana perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dana perimbangan meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, demikian sebaliknya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah harus terus berupaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah-nya masing-masing melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah secara lebih efektif dan efisien.
2. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah harus mampu menerapkan kebijakan yang tepat terkait dengan belanja modalnya. Cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan terus meningkatkan jumlah belanja modal serta mengalokasikan belanja modal secara tepat sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat di wilayah masing - masing kabupaten/kota.
3. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah harus terus berupaya untuk meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan sebagai bagian dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui perluasan sumber-sumber pendapatan baru berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran kinerja keuangan dengan metode selain rasio kemandirian untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah secara akurat.

5.3 Implikasi

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan beberapa temuan terkait pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan masukan dan arahan bagi pemerintah daerah.

Implikasi dari temuan ini adalah pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan dan atau peningkatan dalam pengelolaan pendapatan yang untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan guna untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat sehingga membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin turun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi*, 2(1), 1614-1624.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. A. (2016, Agustus). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30-38.
- Antari, N. P., & Sedana, I. P. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 No. 2, 1080-1110.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi. (2022, Oktober). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan). *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 7 No. 1, 60-81.
- Astiti, D. Y., & Mimba, N. S. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 14(3), 1924-1950.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023, Februari). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Journal Economina*, 2 No. 2, 613-621.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2).
- Fauziyah, I. N., & Ekaningtias, D. (2022, January-June). Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Public and Business Accounting*, 3 No. 1, 34-48. doi:<https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.280>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. 305-360.

Marsono. (2005). *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*. Jakarta Eka Jaya.

Nugraha, A. C., & Trisnawati, R. (2019). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015—2017)*.

Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiscal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sari, N. D., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8 No. 8, 4759-4787.

Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sutrisno, W. H., & Sugiyanto, E. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel Penelitian

Kabupaten/Kota	Periode Tahun	PAD (X1)	BM (X2)
Banjarnegara	2018	235.994.436.137,00	474.607.689.278,00
	2019	257.700.650.110,00	358.205.528.802,00
	2020	238.638.994.321,00	348.505.249.709,00
	2021	313.830.623.336,00	294.844.828.809,00
Banyumas	2018	648.326.914.034,83	525.416.939.614,00
	2019	686.805.512.326,17	478.797.497.271,00
	2020	668.211.148.299,00	363.470.409.584,00
	2021	761.991.440.173,00	432.235.246.229,00
Batang	2018	237.547.973.048,00	163.400.979.708,00
	2019	245.836.087.092,28	211.778.239.648,00
	2020	257.422.866.095,46	152.870.895.295,00
	2021	322.789.372.917,64	196.084.228.826,00
Blora	2018	203.182.795.054,00	499.439.779.133,00
	2019	246.863.066.484,00	466.887.346.008,00
	2020	299.687.660.301,00	349.064.685.820,00
	2021	326.770.477.077,00	289.444.143.812,00
Boyolali	2018	342.957.213.726,00	498.972.083.904,00
	2019	395.431.863.402,00	530.593.843.520,00
	2020	451.543.582.894,00	530.593.843.520,00
	2021	514.970.001.433,95	443.846.199.415,00

Brebes	2018	346.907.972.510,31	527.158.454.521,00
	2019	379.091.298.714,05	621.919.531.365,00
	2020	392.541.730.819,14	432.556.254.864,00
	2021	518.511.128.704,62	439.319.806.903,00
Cilacap	2018	527.577.740.281,47	550.840.750.506,00
	2019	574.276.795.303,59	663.321.198.006,20
	2020	591.343.787.160,48	462.431.933.784,00
	2021	739.133.833.863,79	583.816.848.983,00
Demak	2018	342.324.870.245,00	414.681.322.203,00
	2019	407.400.540.994,55	455.482.429.713,00
	2020	439.694.424.385,95	286.913.547.351,00
	2021	445.010.135.308,79	279.922.485.672,00
Grobogan	2018	315.743.175.974,00	423.425.389.079,00
	2019	344.559.032.450,00	448.666.101.416,00
	2020	350.453.524.065,00	338.711.253.077,00
	2021	424.186.340.266,00	290.180.602.809,00
Jepara	2018	369.330.454.700,00	397.783.041.502,00
	2019	384.979.296.768,00	325.214.472.023,00
	2020	419.363.320.517,00	266.275.554.085,00
	2021	408.635.274.883,00	231.972.750.951,00
Karanganyar	2018	343.156.469.167,00	261.936.024.361,00
	2019	387.763.013.239,00	286.884.774.876,00
	2020	384.682.993.533,00	148.559.342.370,00
	2021	426.649.591.411,95	193.819.710.155,00
Kebumen	2018	352.047.092.281,90	370.004.376.524,00

	2019	409.163.433.329,68	365.840.794.028,00
	2020	403.025.963.783,80	288.801.049.018,00
	2021	472.017.087.115,00	266.110.950.340,00
Kendal	2018	335.892.237.024,00	284.991.421.170,00
	2019	350.500.849.956,00	283.503.675.627,00
	2020	356.753.593.703,00	108.455.011.780,00
	2021	439.197.987.791,00	141.147.838.380,00
Klaten	2018	395.884.244.135,42	384.574.980.960,00
	2019	311.648.401.655,44	308.145.403.976,00
	2020	329.963.261.898,00	157.126.719.574,00
	2021	315.304.009.782,00	189.606.772.936,00
Kudus	2018	337.364.609.424,00	377.578.292.200,00
	2019	343.824.122.868,00	278.210.578.665,00
	2020	383.892.971.961,00	221.806.162.432,00
	2021	507.167.074.775,00	155.227.921.015,00
Magelang	2018	325.089.093.092,00	501.727.375.261,00
	2019	417.178.099.961,00	386.529.995.844,00
	2020	329.769.193.224,00	214.407.058.402,00
	2021	375.378.465.373,00	251.160.713.253,00
Pati	2018	384.041.846.939,00	439.492.642.225,00
	2019	363.997.151.178,00	405.100.296.549,00
	2020	371.708.005.192,00	315.613.926.745,00
	2021	388.644.537.358,00	271.122.015.437,00
Pekalongan	2018	311.288.143.681,83	431.412.970.525,00
	2019	341.344.415.574,51	345.165.297.652,00

	2020	341.901.469.549,15	239.471.535.400,00
	2021	346.599.468.113,44	208.046.317.066,00
Pemalang	2018	300.481.887.079,00	291.381.937.258,00
	2019	350.559.139.753,00	347.657.852.647,00
	2020	328.353.248.698,00	342.593.987.691,00
	2021	365.393.902.790,00	180.049.321.707,00
Purbalingga	2018	282.679.019.517,00	270.527.629.406,00
	2019	305.996.806.188,00	262.136.781.292,00
	2020	313.618.688.781,00	130.334.116.841,00
	2021	377.882.022.370,00	196.964.893.644,00
Purworejo	2018	286.971.590.024,00	377.024.967.851,00
	2019	280.396.155.599,65	327.413.701.413,50
	2020	304.800.202.905,00	254.015.009.152,00
	2021	438.264.776.270,00	266.462.662.108,00
Rembang	2018	296.676.436.263,15	309.448.505.895,00
	2019	308.445.489.137,31	207.071.429.379,00
	2020	326.670.124.350,50	154.123.440.858,00
	2021	404.100.646.579,46	187.286.320.101,00
Semarang	2018	383.475.678.133,60	405.051.441.667,00
	2019	429.011.081.257,00	393.472.095.964,00
	2020	442.528.167.477,97	219.069.909.089,00
	2021	575.748.297.606,00	292.001.109.109,00
Sragen	2018	334.303.284.344,00	428.218.853.657,00
	2019	368.325.799.601,00	249.326.386.054,00
	2020	394.464.906.604,00	268.507.459.807,00

	2021	537.265.408.211,00	211.772.001.931,00
Sukoharjo	2018	433.485.481.219,00	388.468.318.338,00
	2019	458.742.223.869,00	350.577.750.659,00
	2020	469.540.567.890,00	238.738.380.776,00
	2021	528.354.094.902,00	283.872.873.485,00
Tegal	2018	372.282.676.054,62	417.983.021.935,00
	2019	436.003.392.413,29	434.393.482.658,00
	2020	439.931.567.174,60	248.977.818.850,00
	2021	591.004.284.313,00	368.877.462.091,00
Temanggung	2018	252.019.934.778,00	185.771.793.520,00
	2019	278.313.775.793,00	223.249.187.567,00
	2020	307.488.084.365,00	102.083.054.523,00
	2021	363.128.342.571,00	235.995.614.408,00
Wonogiri	2018	269.032.427.619,00	406.899.652.093,28
	2019	287.221.631.013,00	565.091.976.630,87
	2020	274.293.129.950,00	291.314.088.408,00
	2021	241.300.072.883,00	364.807.421.927,00
Wonosobo	2018	226.819.478.601,00	381.600.659.789,00
	2019	238.371.743.591,00	430.765.650.280,00
	2020	251.724.091.045,00	243.001.724.523,00
	2021	339.745.535.241,00	256.221.238.680,00
Kota Magelang	2018	249.877.424.347,00	237.422.914.193,00
	2019	273.582.932.151,00	272.055.204.204,00
	2020	290.756.816.510,00	116.558.397.390,00
	2021	319.391.277.825,00	186.005.847.297,00
Kota Pekalongan	2018	179.224.408.698,00	146.382.593.476,00

	2019	212.777.435.293,60	182.153.984.579,00
	2020	229.867.935.360,95	126.926.093.953,00
	2021	252.037.004.472,02	160.513.725.170,00
Kota Salatiga	2018	208.926.057.032,00	222.021.981.988,00
	2019	221.089.796.000,00	183.724.641.420,00
	2020	219.539.400.332,00	174.131.330.590,00
	2021	280.684.937.797,00	130.277.078.909,00
Kota Semarang	2018	1.821.274.103.250,0 0	1.228.459.434.270,0 0
	2019	2.066.333.418.588,0 0	1.054.761.429.772,0 0
	2020	2.024.537.808.307,0 0	506.420.330.795,00
	2021	2.385.944.758.477,0 0	953.669.847.701,88
Kota Surakarta	2018	525.125.554.686,09	523.770.318.153,00
	2019	567.757.960.983,00	543.578.176.920,00
	2020	492.776.208.640,00	250.969.805.187,00
	2021	560.579.997.086,00	341.100.953.660,00
Kota Tegal	2018	275.021.448.594,41	113.622.507.976,00
	2019	285.575.788.984,16	165.982.915.065,00
	2020	266.580.982.102,00	148.142.669.908,00
	2021	308.116.840.289,00	146.322.223.928,00

Lanjutan Lampiran 1.

Kabupaten/Kota	Periode Tahun	DP (X3)	KK (Y)
Banjarnegara	2018	1.354.080.374.738,0 0	13,49
	2019	1.345.282.274.537,0 0	14,69
	2020	1.238.071.740.603,0 0	14,48
	2021	1.251.747.015.765,0 0	18,86
Banyumas	2018	1.894.413.016.142,0 0	26,61
	2019	1.940.352.355.633,0 0	26,81
	2020	1.854.294.495.150,0 0	27,15
	2021	1.881.829.664.924,0 0	30,05
Batang	2018	1.048.707.118.663,0 0	17,09
	2019	1.090.972.263.503,0 0	17,02
	2020	1.008.861.912.901,0 0	18,45
	2021	1.068.002.486.995,0 0	22,74
Blora	2018	1.375.550.409.408,0 0	12,64
	2019	1.441.715.460.262,0 0	15,13
	2020	1.259.239.750.269,0 0	20,44
	2021	1.406.481.782.693,0 0	18,01
Boyolali	2018	1.438.528.619.300,0 0	19,01
	2019	1.436.635.314.225,0 0	21,12
	2020	1.356.374.607.571,0 0	24,59

	2021	1.651.977.755.226,0 0	28,21
Brebes	2018	1.753.057.931.104,0 0	17,39
	2019	1.876.097.637.787,0 0	18,00
	2020	1.708.279.450.821,0 0	20,35

	2021	2.238.340.473.031,0 0	21,11
Cilacap	2018	1.874.260.346.332,0 0	27,36
	2019	1.928.670.863.364,0 0	22,81
	2020	1.757.591.202.654,0 0	25,20
	2021	2.137.587.242.274,0 0	30,75
Demak	2018	1.205.186.810.394,0 0	20,12
	2019	1.274.017.335.391,0 0	22,08
	2020	1.181.046.800.246,0 0	29,43
	2021	1.230.848.488.721,0 0	24,81
Grobogan	2018	1.794.017.726.760,0 0	15,84
	2019	1.853.501.732.035,0 0	16,48
	2020	1.746.296.573.234,0 0	17,35
	2021	1.508.851.762.438,0 0	20,60
Jepara	2018	1.339.634.292.620,0 0	20,73
	2019	1.393.154.748.566,0 0	20,06
	2020	1.581.176.844.190,0 0	23,39
	2021	1.642.016.699.042,0 0	21,97
Karanganyar	2018	1.325.732.297.703,0 0	20,37
	2019	1.358.762.557.968,0 0	22,72
	2020	1.247.805.559.571,0 0	23,56
	2021	1.265.238.854.296,0 0	25,86
Kebumen	2018	1.654.135.303.906,0 0	16,29
	2019	1.688.387.155.843,0 0	18,01

	2020	2.074.494.939.094,0 0	18,13
	2021	2.059.293.466.080,0 0	21,24

Kendal	2018	1.299.802.798.970,0 0	19,62
	2019	1.348.372.347.984,0 0	19,71
	2020	1.228.541.096.335,0 0	21,38
	2021	1.293.961.426.712,0 0	25,05
Klaten	2018	1.652.127.767.661,0 0	21,54
	2019	1.666.073.637.378,0 0	16,52
	2020	1.573.561.257.076,0 0	18,83
	2021	1.923.414.170.983,0 0	14,80
Kudus	2018	1.281.771.374.568,0 0	20,59
	2019	1.298.060.004.624,0 0	20,51
	2020	1.183.590.147.772,0 0	24,57
	2021	1.239.890.567.326,0 0	31,98
Magelang	2018	1.398.132.841.570,0 0	17,22
	2019	1.452.804.059.102,0 0	20,22
	2020	1.331.514.071.778,0 0	17,00
	2021	1.378.841.533.695,0 0	18,79
Pati	2018	1.637.310.968.390,0 0	20,27
	2019	1.637.460.890.857,0 0	19,14
	2020	1.505.063.848.568,0 0	17,10
	2021	1.519.385.725.982,0 0	17,52
Pekalongan	2018	1.288.217.218.488,0 0	18,21
	2019	1.321.954.447.227,0 0	19,51
	2020	1.206.915.407.953,0 0	21,08

	2021	1.208.036.399.361,0 0	21,20
Pemalang	2018	1.542.918.673.569,0 0	15,19

	2019	1.598.475.375.026,0 0	16,44
	2020	1.478.357.232.531,0 0	16,77
	2021	1.549.611.665.251,0 0	17,60
Purbalingga	2018	1.240.574.231.875,0 0	17,97
	2019	1.271.720.206.430,0 0	18,28
	2020	1.144.405.027.431,0 0	20,38
	2021	1.181.252.057.178,0 0	24,07
Purworejo	2018	1.264.233.475.000,0 0	16,97
	2019	1.292.431.347.427,0 0	15,49
	2020	1.652.291.183.635,0 0	17,15
	2021	1.654.201.146.712,0 0	24,73
Rembang	2018	902.171.379.111,00	20,71
	2019	1.051.964.945.792,0 0	21,32
	2020	1.368.623.473.244,0 0	22,07
	2021	1.299.326.523.909,0 0	28,14
Semarang	2018	1.307.508.472.787,0 0	24,33
	2019	1.351.090.467.972,0 0	25,23
	2020	1.240.480.579.637,0 0	25,02
	2021	1.264.272.822.840,0 0	33,17
Sragen	2018	1.405.508.762.647,0 0	19,00
	2019	1.489.466.585.984,0 0	19,91
	2020	1.351.654.579.917,0 0	22,81
	2021	1.324.329.482.026,0 0	31,41

Sukoharjo	2018	1.219.811.099.454,0 0	28,04
	2019	1.241.762.236.865,0 0	31,30

	2020	1.163.627.289.398,0 0	31,39
	2021	1.151.058.014.075,0 0	34,75
Tegal	2018	1.513.203.330.274,0 0	18,53
	2019	1.586.668.848.339,0 0	23,73
	2020	1.477.714.812.445,0 0	25,91
	2021	1.533.598.637.942,0 0	27,91
Temanggung	2018	1.069.110.356.426,0 0	17,79
	2019	1.133.246.263.266,0 0	18,19
	2020	1.046.567.778.773,0 0	21,18
	2021	1.120.897.599.379,0 0	23,61
Wonogiri	2018	1.532.139.685.475,0 0	14,13
	2019	1.594.457.129.912,0 0	13,95
	2020	1.451.651.540.186,0 0	14,54
	2021	1.486.802.858.050,0 0	12,52
Wonosobo	2018	1.139.805.205.659,0 0	16,77
	2019	1.236.562.229.419,0 0	17,28
	2020	1.123.108.003.017,0 0	17,02
	2021	1.150.595.572.828,0 0	22,66
Kota Magelang	2018	570.455.641.253,00	39,08
	2019	574.099.278.956,00	40,55
	2020	525.575.219.057,00	45,77
	2021	594.106.458.133,00	48,60
Kota Pekalongan	2018	586.379.794.858,00	25,79
	2019	610.332.820.948,00	29,73

	2020	625.666.101.409,00	32,80
	2021	607.835.271.117,00	36,70
Kota Salatiga	2018	561.012.927.696,00	31,49

	2019	569.354.886.045,00	32,86
	2020	522.042.585.441,00	33,71
	2021	534.246.583.063,00	43,39
Kota Semarang	2018	1.438.790.841.076,0 0	79,14
	2019	1.738.443.043.620,0 0	86,61
	2020	1.669.101.931.826,0 0	90,77
	2021	1.699.819.686.103,0 0	102,82
Kota Surakarta	2018	1.090.922.293.666,0 0	40,28
	2019	1.110.329.047.182,0 0	41,97
	2020	1.045.123.446.172,0 0	38,81
	2021	1.056.913.508.389,0 0	42,43
Kota Tegal	2018	602.567.259.369,00	40,14
	2019	641.682.768.016,00	39,48
	2020	647.914.063.712,00	37,00
	2021	617.795.319.016,00	44,52

Lampiran 2. Data Input Analisis Regresi Linear Berganda

No.	LN_PAD	LN_BM	LN_DP	LN_KK
1	26,18707 4	26,88575 4	27,93414 4	2,602308
2	26,27506 4	26,60437 3	27,92762 5	2,687409
3	26,19821 8	26,57691 9	27,84457 6	2,672487
4	26,47211 9	26,40971 5	27,85556 1	2,937083
5	27,19766 1	26,98745 8	28,26993 0	3,281427
6	27,25531 7	26,89454 4	28,29389 1	3,288767
7	27,22787 0	26,61896 4	28,24852 5	3,301197
8	27,35920 1	26,79223 6	28,26326 6	3,402905
9	26,19363 5	25,81947 3	27,67857 9	2,838648
10	26,22793 1	26,07880 6	27,71809 0	2,834215
11	26,27398 6	25,75286 0	27,63984 4	2,915237
12	26,50026 6	26,00181 0	27,69681 1	3,124268
13	26,03737 2	26,93675 3	27,94987 5	2,536625
14	26,23210 0	26,86935 4	27,99685 5	2,716726
15	26,42600 7	26,57852 3	27,86152 9	3,017496
16	26,51252 4	26,39122 8	27,97211 3	2,890939
17	26,56087 2	26,93581 6	27,99464 2	2,945200
18	26,70324 4	26,99726 3	27,99332 5	3,050248
19	26,83593 8	26,99726 3	27,93583 7	3,202214

20	26,96737 4	26,81874 4	28,13299 4	3,339792
21	26,57232 5	26,99076 7	28,19238 3	2,856088
22	26,66104 3	27,15607 7	28,26021 5	2,890338
23	26,69590 9	26,79297 8	28,16650 8	3,013288
24	26,97422 7	26,80849 3	28,43675 6	3,049654
25	26,99156 2	27,03471 2	28,25923 5	3,308913

26	27,076377	27,220525	28,28785 2	3,127286
27	27,105663	26,859765	28,19496 5	3,227006
28	27,328745	27,092853	28,39069 9	3,426022
29	26,559026	26,750776	27,81765 6	3,001846
30	26,733063	26,844623	27,87319 6	3,094685
31	26,809346	26,382447	27,79742 2	3,382091
32	26,821363	26,357779	27,83872 5	3,211270
33	26,478195	26,771643	28,21547 9	2,762701
34	26,565531	26,829545	28,24809 8	2,802093
35	26,582494	26,548414	28,18851 8	2,853776
36	26,773439	26,393769	28,04237 0	3,025372
37	26,634958	26,709173	27,92341 8	3,031640
38	26,676455	26,507751	27,96259 2	2,998813
39	26,762003	26,307798	28,08919 1	3,152287
40	26,736089	26,169886	28,12694 6	3,089620
41	26,561452	26,291366	27,91298 6	3,013881
42	26,683660	26,382346	27,93759 6	3,123429
43	26,675685	25,724250	27,85240 8	3,159452
44	26,779229	25,990194	27,86628 2	3,252577
45	26,587031	26,636781	28,13430 0	2,790527
46	26,737381	26,625464	28,15479 5	2,890942

47	26,722267	26,389004	28,36073 9	2,897354
48	26,880281	26,307179	28,35338 4	3,055738
49	26,540056	26,375725	27,89323 4	2,976747
50	26,582629	26,370491	27,92991 9	2,981289
51	26,600311	25,409601	27,83684 8	3,062544
52	26,808216	25,673074	27,88873 0	3,220784
53	26,704388	26,675405	28,13308 5	3,069729
54	26,465141	26,453838	28,14149 1	2,804437

55	26,522247	25,780318	28,08436 2	2,935550
56	26,476803	25,968218	28,28512 3	2,694306
57	26,544430	26,657044	27,87926 4	3,024858
58	26,563396	26,351644	27,89189 2	3,020790
59	26,673630	26,125070	27,79957 3	3,201560
60	26,952106	25,768160	27,84604 4	3,465225
61	26,507365	26,941323	27,96615 9	2,846185
62	26,756779	26,680475	28,00451 7	3,006455
63	26,521659	26,091142	27,91733 8	2,832953
64	26,651201	26,249359	27,95226 5	2,933383
65	26,674017	26,808887	28,12407 6	3,009307
66	26,620412	26,727401	28,12416 8	2,951850
67	26,641374	26,477786	28,03985 6	2,839209
68	26,685931	26,325835	28,04932 7	2,863145
69	26,463985	26,790332	27,88428 0	2,901962
70	26,556158	26,567289	27,91013 2	2,970798
71	26,557788	26,201700	27,81908 9	3,048313
72	26,571436	26,061027	27,82001 7	3,053968
73	26,428653	26,397901	28,06469 7	2,720801
74	26,582795	26,574485	28,10007 1	2,799590
75	26,517356	26,559812	28,02195 3	2,819680
76	26,624242	25,916497	28,06902	2,867628

				5	
77	26,367578	26,323640	27,84659	5	2,888445
78	26,446841	26,292132	27,87139	2	2,905615
79	26,471444	25,593367	27,76590	6	3,014376
80	26,657848	26,006291	27,79759	6	3,181028
81	26,382649	26,655577	27,86548	7	2,831394
82	26,359469	26,514490	27,88754	6	2,739938
83	26,442922	26,260659	28,13318	4	2,841793

84	26,806089	26,308500	28,13433 9	3,207906
85	26,415908	26,458058	27,52807 0	3,030799
86	26,454811	26,056330	27,68168 1	3,059695
87	26,512217	25,761020	27,94482 7	3,094355
88	26,724930	25,955904	27,89286 7	3,337164
89	26,672542	26,727280	27,89914 5	3,191719
90	26,784749	26,698276	27,93193 3	3,228148
91	26,815770	26,112657	27,84652 0	3,219649
92	27,078936	26,400023	27,86551 8	3,501496
93	26,535314	26,782900	27,97142 0	2,944368
94	26,632234	26,242029	28,02943 9	2,991128
95	26,700796	26,316145	27,93235 1	3,127192
96	27,009758	26,078776	27,91192 7	3,446976
97	26,795124	26,685477	27,82971 7	3,333505
98	26,851754	26,582848	27,84755 3	3,443479
99	26,875021	26,198634	27,78256 3	3,446419
100	26,993033	26,371792	27,77170 3	3,548124
101	26,642919	26,758707	28,04525 0	2,919637
102	26,800916	26,797217	28,09265 8	3,166602
103	26,809885	26,240630	28,02151 8	3,254656
104	27,105089	26,633730	28,05863 8	3,329061
105	26,252774	25,947785	27,69784	2,878855

			8	
106	26,352015	26,131554	27,756107	2,900634
107	26,451702	25,349053	27,676537	3,053197
108	26,618022	26,187079	27,745151	3,161788
109	26,318098	26,731832	28,057686	2,648206
110	26,383520	27,060254	28,097554	2,635340
111	26,337463	26,397668	28,003723	2,676679
112	26,209307	26,622635	28,027649	2,527504

113	26,147420	26,667641	27,76187 8	2,819611
114	26,197097	26,788830	27,84335 6	2,849806
115	26,251599	26,216334	27,74712 1	2,834198
116	26,551463	26,269307	27,77130 1	3,120552
117	26,244236	26,193109	27,06970 1	3,665594
118	26,334871	26,329271	27,07606 8	3,702420
119	26,395753	25,481658	26,98775 9	3,823559
120	26,489683	25,949044	27,11032 4	3,883706
121	25,911905	25,709490	27,09723 4	3,250036
122	26,083513	25,928118	27,13727 0	3,392070
123	26,160771	25,566871	27,16208 3	3,490398
124	26,252842	25,801645	27,13317 0	3,602754
125	26,065246	26,126042	27,05301 0	3,449745
126	26,121835	25,936704	27,06777 0	3,492247
127	26,114798	25,883076	26,98101 5	3,517937
128	26,360499	25,592929	27,00412 3	3,770207
129	28,230557	27,836782	27,99482 4	4,371155
130	28,356797	27,684336	28,18401 1	4,461466
131	28,336363	26,950633	28,14330 7	4,508320
132	28,500616	27,583583	28,16154 3	4,632967
133	26,986903	26,984319	27,71804 5	3,695765
134	27,064961	27,021439	27,73567	3,736854

			8	
135	26,923321	26,248598	27,675156	3,658595
136	27,052238	26,555444	27,686374	3,747887
137	26,340115	25,456147	27,124465	3,692297
138	26,377773	25,835151	27,187360	3,675859
139	26,308944	25,721442	27,197024	3,610845
140	26,453745	25,709077	27,149423	3,796008

Lampiran 3. Output Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

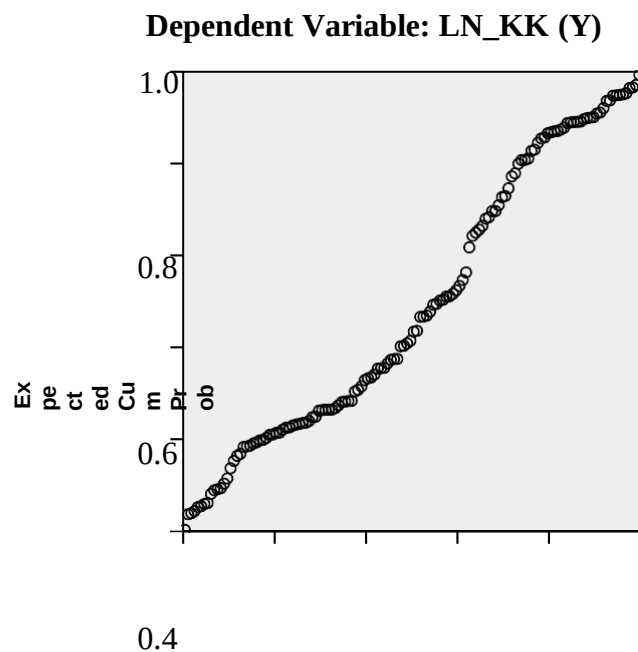
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardiz ed Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,98914977
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,079
Kolmogorov- Smirnov Z		1,154
Asymp. Sig. (2- tailed)		,139

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,365	,665			
LN_PAD (X1)	,947	,022	1,017	,691	1,448
LN_BM (X2)	-,001	,021	-,001	,569	1,757
LN_DP (X3)	-,984	,029	-,854	,608	1,644

a. Dependent Variable: LN_KK (Y)

Uji Heteroskedastisitas

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN_DP (X3), LN_PAD (X1a), LN_BM (X2)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Abresid

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,179 _a	,032	,011	,04628

a. Predictors: (Constant), LN_DP (X3),
LN_PAD (X1), LN_BM (X2)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,010	3	,003	1,497	,218 ^a
	Residual	,291	136	,002		
	Total	,301	139			

a. Predictors: (Constant), LN_DP (X3), LN_PAD (X1), LN_BM (X2)

b. Dependent Variable: Abresid

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,042	,352		-,119	,906
LN_PAD (X1)	-,011	,012	-,092	-,909	,365
LN_BM (X2)	-,015	,011	-,148	-1,327	,187
LN_DP (X3)	,028	,015	,200	1,849	,067

a. Dependent Variable: Abresid

Lampiran 4. *Output Analisis Regresi Berganda*

Regression

Variables Entered/Re mo ved^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN_DP (X3), LN_PAD (X1 _a), LN_BM (X2)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LN_KK (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,974 _a	,948	,947	,08745

a. Predictors: (Constant), LN_DP (X3), LN_PAD (X1), LN_BM (X2)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,939	3	6,313	825,49	,000 _a
	Residual	1,040	136	,008	4	
	Total	19,979	139			

a. Predictors: (Constant), LN_DP (X3), LN_PAD (X1), LN_BM (X2)

b. Dependent Variable: LN_KK (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,365	,665		8,069	,000
LN_PAD (X1)	,947	,022	1,017	43,189	,000
LN_BM (X2)	-,001	,021	-,001	-,052	,959
LN_DP (X3)	-,984	,029	-,854	-34,028	,000

a. Dependent Variable: LN_KK (Y)

Lampiran 5. *Output* Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_PAD (X1)	140	25,9119	28,5006	26,6449	,4070
LN_BM (X2)	140	25,3491	27,8368	26,4148	,4641
LN_DP (X3)	140	26,9810	28,4368	27,8699	,3289
LN_KK (Y)	140	2,5275	4,6330	3,1497	,3791
Valid N (listwise)	140				

Lampiran 6. Tabel Distribusi F ($\alpha = 0,05$)

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Lampiran 7. Tabel Distribusi t

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195